



**ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI  
DESA MANDALAMUKTI KABUPATEN BANDUNG BARAT**

**Cindy Purnamasari<sup>1</sup>, Dicky Maryono<sup>2</sup>**

Universitas Teknologi Digital

Email : [Cindy10120234@digitechuniversity.ac.id](mailto:Cindy10120234@digitechuniversity.ac.id)

***Abstract***

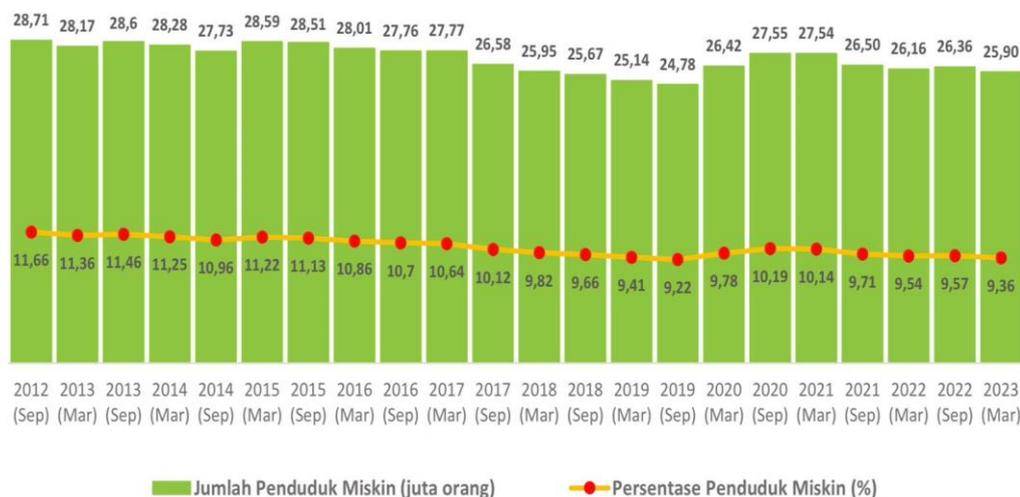
*The authors conducted this research using a qualitative approach based on the background and issues discussed. The aim of this research is to broaden our understanding of the phenomena faced by the research subjects. This type of qualitative descriptive research is used in this study to reveal facts, symptoms, or incidents about the service effort given by a Hope Family Program officer to a recipient of aid in Mandalamukti Village, West Bandung Prefecture. The Hope Family Program (PKH) is a social protection policy created by the government to reduce poverty in Indonesia. It gives basic rights to people through the implementation of social protection centralized in the household. PKH started in Cikalong Wetan district in 2012. Initially, there were 2,138 Beneficiary Families (KPM) in 13 villages. Currently there are 617 KPM in Cikalong Wetan, indicating that the number of KPMs has decreased for some reason. Field research shows that DTKS uses data to target government aid recipients, but there are people who are jealous of feeling worthy of help. Contrary to the information obtained from interviews with the escort of the PKH, escort of PKH Village Mandalamukti stated that the circle corresponds to the results of DTKS data.*

*Keyword : Family Hope Program, Proverty, Beneficiary Family*

## 1. PENDAHULUAN

Badan Pusat Statistik (2023) menyatakan tingkat kemiskinan di Indonesia menjadikannya negara termiskin ke-73 di seluruh dunia. Jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 25,90 juta orang pada Maret 2023, turun dari 0,46 juta orang pada September 2022 dan 0,26 juta orang pada Maret 2022. Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 adalah 9,36%, turun 0,21 persen poin dari September 2022 dan 0,18 persen dari Maret 2022. Jumlah penduduk miskin di perkotaan turun sebesar 0,24 juta orang, dan jumlah penduduk miskin di pedesaan turun sebesar 0,22 juta orang.

**Gambar 1 1**  
**Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin, September 2012-Maret 2023**



Sumber : <https://webapi.bps.go.id/>

Kemiskinan menjadi permasalahan di hampir semua negara, baik di negara maju maupun negara berkembang dengan perbedaan tingkat permasalahannya. Indonesia menjadi salah satu negara berkembang yang menjadikan kemiskinan suatu permasalahan penting dan sangat serius karena kemiskinan membuat masyarakat Indonesia mengalami berbagai kesulitan dalam memenuhi dasar hidupnya.

Pemerintah Indonesia telah memulai program khusus yang dikenal sebagai Program Keluarga Harapan (PKH) sejak tahun 2007 untuk memerangi kemiskinan berbasis rumah tangga. Menurut laman Kemensos, program ini memberikan bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang telah ditetapkan sebagai penerima manfaat program.

Banyak masyarakat kurang mampu di Desa Mandalamukti Kabupaten Bandung Barat dikarenakan kurangnya lapangan pekerjaan, Desa Mandalamukti memiliki 4.160 Kk, 18 Rw dan 78 Rt, penduduknya didominasi oleh buruh pabrik, guru honorer dan sebagian kecil memiliki tempat usaha. Dengan begitu pemerintah setempat juga dapat melihat Desa Mandalamukti masih terdapat masyarakat miskin bahkan sangat miskin, dengan begitu pemerintah memberikan kebijakan untuk memilih Desa Mandalamukti jadi salah satu daerah yang mendapatkan kebijakan pemerintah berupa bantuan langsung bersyarat dari pemerintah.

Jadi permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program keluarga harapan di Desa Mandalamukti ini adalah dimana dalam proses memilih masyarakat yang menjadi penerima bantuan PKH sering tidak tepat sasaran, dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Mandalamukti, hasil penelitian lain juga menunjukkan hasil yang sama seperti penelitian dari Saragi dkk (2021) yang memiliki hasil bahwa penetapan peserta PKH dilakukan berdasarkan data yang sudah ada di sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), namun tetap dilakukan pengecekan kebenaran kondisi peserta hingga diverifikasi ulang oleh Kementerian sosial. Sedangkan kendala yang terdapat dalam pelaksanaan yaitu masih sulitnya mengumpulkan semua peserta secara bersama-sama setiap bulan untuk pengecekan dan pembinaan. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Jannah dkk (2019) dan Ridho (2019). berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Mandalamukti Kabupaten Bandung Barat.**

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka penulis mengambil perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pelaksanaan PKH di Desa Mandalamukti Kabupaten Bandung Barat dalam menunjukkan kesejahteraan masyarakat ?
- b. Mengapa terjadi kendala dalam pelaksanaan PKH di Desa Mandalamukti Kabupaten Bandung Barat ?

### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang dikemukakan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan PKH di Desa Mandalamukti Kabupaten Bandung Barat,
- b. Untuk mengetahui apa yang menjadi kendala didalam pelaksanaan PKH di Desa Mandalamukti Kabupaten Bandung Barat.

## 2. KAJIAN LITERATUR

### Pengertian Kemiskinan

Miskin adalah kondisi umum yang menggambarkan suatu keadaan rumah tangga, komunitas, atau individu yang berada dalam kondisi yang sangat terbatas, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar. Akibatnya, orang yang terlibat akan mengalami beberapa hambatan untuk melakukan tugas sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang harus mereka lakukan. Faktor internal individu atau rumah tangga yang gagal beradaptasi dengan lingkungannya atau merespon perubahan sekitar dapat menyebabkan keterbatasan tersebut. Saat itu juga, hal sebaliknya dapat terjadi, lingkunganlah yang menjadikan seseorang menjadi miskin (Mulyono, 2017)

### Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan perlindungan *social* upaya dari pemerintah yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM) dan bagi anggota keluarga Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM) diwajibkan untuk memenuhi persyaratan dan ketentuan yang di tetapkan oleh pemerintah (Saragi et al., 2021)

Oleh sebab itu, pemerintah segera membentuk Tim Pengendali PKH dalam TKPK agar terjadi koordinasi dan sinergi yang baik.

### Pengertian Indikator Efektivitas PKH

Indikator adalah sesuatu yang bisa menentukan kegiatan yang akan dilakukan sebagaimana dalam indikator efektifitas PKH, kegiatan memonitoring menjadi bagian dari kegiatan evaluasi operasional yang bertujuan untuk menilai efektifitas pelaksanaan program . Ruang lingkup pemanfaatan PKH secara umum dilakukan pada sisi input, proses dan output (Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, 2019).

Selalu ada evaluasi program untuk mengevaluasi seberapa efektif program tersebut. Setiap tugas akan berhasil jika dilakukan dengan baik benar dan menghasilkan hasil kerja yang bermanfaat. Efektifitas program keluarga harapan ini didefinisikan sebagai

seberapa baik sasaran program dapat dicapai dan menghasilkan hasil yang sesuai dengan tujuan program tersebut. (Nih Ayu Kartika, 2017).

### **Tujuan PKH**

Tujuan utama dari program ini yaitu mengurangi angka kemiskinan dan bisa menjadi upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama dalam kelompok masyarakat miskin. Tujuan tersebut sekaligus sebagai upaya mempercepat pencapaian target. Secara khusus tujuan dari PKH terdiri atas:

- a. Meningkatkan kondisi *social ekonomi* dari Keluarga Penerima Manfaat
- b. Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak dari Keluarga Penerima Manfaat
- c. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas dan anak-anak dibawah 6 tahun dari Keluarga Penerima Manfaat.
- d. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi Keluarga Penerima Manfaat, (Pedoman Umum PKH).

### **Sasaran PKH**

Sejak tahun 2012, data awal tentang penerima manfaat PKH diambil dari Basis Data Terpadu hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011, yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Program Perlindungan Sosial. Penanganan Orang Miskin (TNP2K). Sasaran PKH sekarang berbasis keluarga, setelah sebelumnya berbasis rumah tangga. Perubahan ini didasarkan pada gagasan bahwa keluarga (yaitu orang tua—ayah, ibu, dan anak) adalah satu orang tua, dan mereka bertanggung jawab atas pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan masa depan anak mereka. Karena itu, keluarga memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam upaya memerangi rantai kemiskinan antar generasi. Beberapa keluarga mungkin tinggal bersama dalam satu rumah tangga dengan satu dapur.

PKH diberikan kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM). Data keluarga yang dapat menjadi peserta PKH dapat diperoleh dari Basis Data Terpadu dan memenuhi sedikitnya satu kriteria kepesertaan program berikut, yaitu:

1. Memiliki ibu hamil/nifas/anak balita
2. Memiliki anak usia 5-7 tahun yang masuk pendidikan dasar (anak pra sekolah)
3. Anak usia SD/MI/Paket A/SDLB (usia 7-12 tahun)
4. Anak SLTP/MTs/Paket B/SMLB (usia 12-15 tahun)

5. Anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar termasuk anak dengan disabilitas.

### 3. METODE

#### **Pendekatan dan jenis Penelitian**

Penulis melakukan penelitian menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman lebih dari fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Untuk mencapai tujuan ini, akan digunakan pendekatan alamiah khusus untuk mendeskripsikannya menggunakan bahasa dan istilah yang relevan dengan dunia alami. Penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif untuk memberikan fakta, gejala atau kejadian tentang cara upaya pelayanan yang diberikan oleh petugas PKH terhadap penerima PKH di Desa Mandalamukti Kabupaten Bandung Barat.

#### **Objek Penelitian**

Objek penelitian adalah sasaran isu yang sedang diteliti dengan riset pada judul yang sudah ditentukan. Objek dari penelitian ini adalah penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Mandalamukti Kabupaten Bandung Barat yang telah di wawancarai untuk kemudian dirangkum dan dijadikan sebuah data yang diperoleh lalu dianalisis.

#### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Wawancara

Dalam penelitian kualitatif, mengumpulkan data dengan cara wawancara adalah cara untuk mengetahui bagaimana subjek penelitian berkontribusi pada peristiwa atau kejadian dari individu, kelompok, organisasi dan sebagainya. (I Wayan Suwendra: 2018, hlm. 64-65).

Teknik wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi secara langsung, tepat dan akurat mengenai data-data kepesertaan, jumlah KPM PKH dalam satu kecamatan, pedoman umum PKH, serta berbagai hal yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan PKH pada KPM.

2. Observasi

Observasi adalah suatu proses dimana fenomena yang terjadi di Desa Mandalamukti dapat dipertimbangkan dan dilihat secara akurat efektivitas dari beberapa aspek yang berhubungan langsung dengan fenomena yang terjadi. Observasi juga dengan

mengadakan pengamatan dan pencatatan langsung dari lokasi penelitian mengenai penentuan kepesertaan, pemberian jenis bantuan, proses penyaluran, pembiayaan yang ada di lapangan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan PKH.

### 3. Dokumentasi

Informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti arsip-arsip, akta ijazah, *raport*, peraturan perundang-undangan, buku harian, surat-surat pribadi, catatan biografi, dan lain-lain, yang terkait dengan subjek yang diteliti dikenal sebagai dokumentasi.

Alat penunjang lain yang digunakan adalah alat berupa *Handphone* yang memanfaatkan fitur perekam dan kamera. *Handphone* dengan fitur perekam ini sangat penting karena dapat digunakan untuk menemukan hal-hal yang mungkin luput dari perhatian penulis atau mungkin mengingatkan hal-hal yang terlupakan. Serta kamera dari *Handphone* membantu mengabadikan momen-momen yang dirasa penting selama penelitian.

### Metode Analisis Data

Menurut Sugiyono (2018), analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang dapat diperoleh dari catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Proses ini mencakup mengkategorikan data sesuai kategorinya, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang hanya perlu dipelajari untuk memahaminya sendiri dan orang lain.

#### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Menurut Sugiyono (2018) reduksi data sebagai berikut: membuat kesimpulan yang dirangkum, memilih topik yang penting, memfokuskan pada topik yang relevan dengan topik penelitian, mencari tema dan pola, dan pada akhirnya, menghasilkan gambaran yang jelas yang akan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data yang selanjutnya. Proses mereduksi data akan ditentukan oleh tujuan yang telah diidentifikasi dan akan dicapai. Peneliti mencoba untuk mengumpulkan kesimpulan dari wawancara dengan informan selama proses reduksi data, yang memusatkan perhatian pada proses menyederhanakan, mengabstraksikan, dan menginformasikan data. Proses reduksi data memerlukan kecerdasan, keluasan, dan kedalaman wawasan yang tinggi.

#### 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah proses mereduksi data, data dipresentasikan. Dalam penelitian kualitatif, data dapat disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, *flowchart*, *table*, atau hubungan antara kategori, tetapi yang paling umum adalah teks naratif. Dengan menyajikan data ini, mereka akan disusun dan diorganisasikan sesuai kategorinya sehingga lebih mudah dipahami. (Sugiyono, 2018), Dan penelitian yang melibatkan informan tentang efektivitas pelaksanaan program PKH akan diuraikan dalam penyajian data ini.

### 3. Penarikan Kesimpulan (*Conclucision Drawing/Verification*)

Penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir dalam analisis penelitian kualitatif. Sugiyono (2018) menyatakan bahwa hasil penelitian metode kualitatif menghasilkan temuan baru. Hasilnya dapat berupa penjelasan atau gambaran tentang sesuatu yang sebelumnya tidak jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas dan terperinci.

## 4. HASIL DAN DISKUSI

### Gambaran Umum PKH Di Desa Mandalamukti

Pada penelitian ini, objek yang diambil oleh penulis untuk penelitian adalah keluarga miskin yang menerima bantuan langsung bersyarat Program Keluarga Harapan (PKH) dari pemerintah. Yang bertempat di Desa Mandalamukti, Kelurahan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat.

### Profile Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan atau yang biasa disebut PKH merupakan program yang dikeluarkan oleh pemerintah pada tahun 2007. Program perlindungan *social* dimana di negara luar dikenal sebagai *Conditional Cash Transfer* (CCT) ini dinilai efektif dalam menanggulangi kemiskinan di negara-negara berkembang maupun di negara maju. Program PKH itu sendiri sudah berjalan selama 7 tahun juga sudah dilaksanakan secara berkelanjutan di 7 Provinsi. Pada tahun 2020 pemerintah sudah melaksanakan program tersebut di 34 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota dan memiliki kurang lebih 10 juta Keluarga Penerima Manfaat PKH yang tersebar diseluruh Indonesia.

Oleh karena itu, tujuan dari bantuan PKH harus tepat dan jelas untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan dengan benar dan sesuai dengan harapan. Keluarga miskin yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu dan yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, pendidikan, dan

kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh pemberi bantuan sosial dan yang berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, daerah terpencil atau tertinggal, atau di dekat perbatasan antarnegara adalah sasaran PKH.

Nominal bantuan yang diberikan mengacu kepada Surat Keputusan Direktur Jendral Perlindungan dan Jminan Sosial Nomor 50/3/BS.00.01/8/2023 mengenai Indeks dan Kategori Bantuan Sosial PKH adalah sebagai berikut

**Table 4.1**  
**Nilai Bantuan PKH**

<b>Kategori Bantuan</b>	<b>Nilai Bantuan/Tahun</b>
Ibu hamil	Rp.3.000.000
Anak usia dini/balita	Rp.3.000.000
Lansia	Rp.2.400.000
Disabilitas	Rp.2.400.000
Anak sekolah SD	Rp.900.000
Anak sekolah SMP	Rp.1.500.000
Anak sekolah SMK	Rp.2.000.000

Sumber : Website PKH tahun 2023

### **Tujuan Program Keluarga Harapan**

Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2018 pada awalnya menyatakan bahwa tujuan umum dari PKH adalah untuk mengurangi jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mengubah cara PKH bertindak yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan dikeluarkan pada tahun 2018 dan menetapkan beberapa tujuan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

### **Sasaran dan Ketentuan Peserta PKH**

Pedoman umum PKH tahun 2018 menyatakan bahwa peserta PKH adalah rumah tangga sangat miskin yang memenuhi kriteria BPS dan memenuhi satu atau lebih kriteria program, di antaranya: Selama program bantuan bersyarat ini berlangsung, peserta PKH telah mengalami beberapa perubahan dan penyesuaian.

1. Memiliki ibu hamil/nifas;

2. Memiliki anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD dan
3. Memiliki anak SD dan SLTP dan anak 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar

Dalam pasal ke 5 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, kriteria kepesertaan di perbaharui, dan dibagi menjadi tiga kelompok yakni kriteria komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Pertama kriteria komponen kesehatan antara lain:

1. Ibu hamil/ menyusui; dan
2. Anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.

Kemudian untuk komponen pendidikan menjadi beberapa kelompok diantaranya:

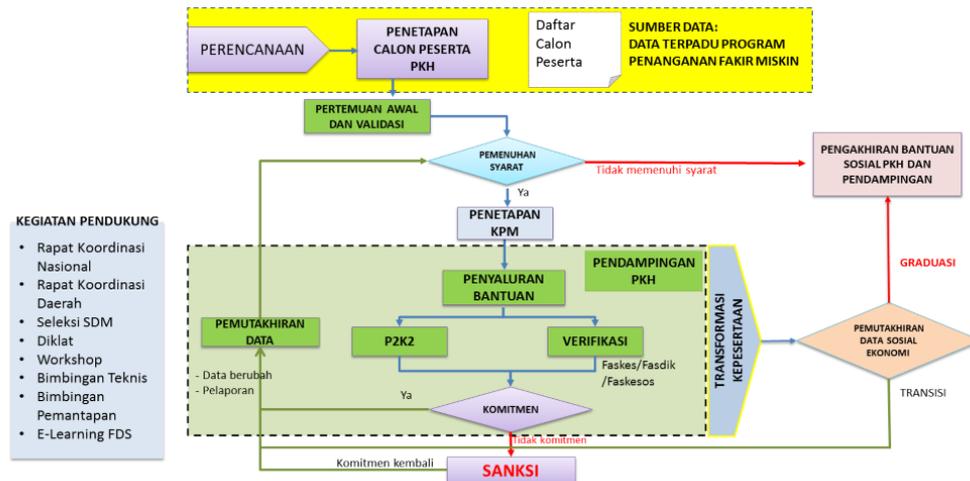
1. Anak sekolah dasar/ madrasah ibtidaiyah atau sederajat;
2. Anak sekolah menengah pertama/ madrasah tsanawiyah atau sederajat;
3. Anak sekolah menengah atas/ madrasah aliyah atau sederajat; dan
4. Anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

Terakhir dan yang terbaru mengenai kriteria kepesertaan PKH adalah komponen kesejahteraan sosial dimana komponen ini meliputi:

1. Lanjut usia mula dari 60 (enam puluh) tahun; dan
2. Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

### **Mekanisme dan Pelaksanaan PKH**

Mekanisme dan pelaksanaan PKH terutama digunakan untuk menentukan sasaran calon KPM. Ini diatur dalam sebuah alur yang terdiri dari sepuluh tahapan, yang dimulai dengan proses perencanaan dan berakhir dengan proses transformasi kepesertaan PKH. Tahapan-tahap tersebut adalah sebagai berikut:



Gambar 4.2

### Mekanisme dan Pelaksanaan PKH

Sumber : Website PKH tahun 2019

1. Penetapan sasaran
2. Persiapan Daerah
3. Pertemuan Awal dan Validasi:
4. Penyaluran Bantuan
5. Pembentukan Kelompok KPM PKH
6. Verifikasi Komitmen
7. Pemutakhiran Data
8. Pengaduan

### Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pendamping PKH Kabupaten Bandung Barat mengenai kepesertaan program, informan menyatakan bahwa masyarakat yang akan menjadi calon KPM PKH, adalah masyarakat yang terdaftar dalam basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), untuk kemudian diolah di Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) Kesejahteraan Sosial, dan menghasilkan data yang akan di validasi oleh pendamping sosial di masing masing daerah. Seperti yang pendamping PKH nyatakan :

“Untuk mencari calon PKH sudah di tentukan oleh pihak Desa, dengan syarat pekerjaan harus buruh, harian lepas atau buruh tani, kemudian di daftarkan ke DTKS diteruskan untuk di olah PUSDATIN”.

Pendamping PKH mengungkapkan, ketika pendamping turun ke Desa-Desa dampingan untuk memvalidasi calon-calon peserta PKH (*inclusion error*), pendamping telah membawa daftar nama calon penerima. Kegiatan ini dilakukan di titik yang telah disepakati dengan pihak pemerintah Desa.

Prosesnya adalah dengan memvalidasi berkas-berkas yang memperkuat keabsahan calon KPM seperti Kartu Keluarga, Buku raport bagi yang memiliki anggota keluarga yang masih sekolah, Kartu Menuju Sehat (KMS) bagi keluarga yang memiliki ibu hamil atau balita, surat keterangan dari pihak desa bagi keluarga yang memiliki lansia atau anggota keluarganya yang menjadi penyandang disabilitas.

Proses validasi hanya didasarkan pada data tersebut, dan tidak dilakukan lebih spesifik lagi, seperti memeriksa aset, menanyakan mata pencaharian kepala keluarga. Selain itu, bilamana dalam proses validasi ada masyarakat yang secara kategori memenuhi syarat kepesertaan tetapi tidak ada pada daftar nama calon penerima PKH, masyarakat tersebut tidak dapat dimasukkan atau diajukan ke dalam data calon penerima PKH (*exclusion error*).

Informan juga menjelaskan bahwa data hasil validasi kepesertaan PKH bisa diketahui berdasarkan komponen yang dimiliki tiap-tiap keluarga di tingkat Desa, Kecamatan, maupun Kabupaten berdasarkan data bayar atau *final closing*. Data tersebut adalah jumlah anak sekolah, jumlah balita dan ibu hamil, jumlah lansia dan disabilitas. Oleh sebab itu, pendamping PKH yang menjadi informan menyatakan bahwa:

“Menurut saya sudah sesuai karna ngacunya kan ke DTKS, DTKS yang usul warga, yang input ke sistem Desa, enggak mungkin asal nentuin peserta”

Berdasarkan penelitian selama dilapangan seputar penentuan sasaran program-program yang digulirkan oleh pemerintah, berdasarkan wawancara dengan pendamping PKH Desa Mandalamukti selama bantuan turun, data yang digunakan adalah data dari sumber yang sama yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Namun masih ada masyarakat yang merasakan kecemburuan yang terjadi di masyarakat dikarenakan merasa dirinya layak mendapatkan bantuan. Informan menyatakan bahwa:

"Kalau menurut saya *mah* yah, kalau mau ada bantuan itu, tidak ada salahnya data calon penerima itu di data yang bener, rumah saya masih ngontrak tapi tidak dapat bantuan. Di masyarakat itu terjadi kecemburuan *teh*, masyarakat tidak paham itu

apa namanya bantuan PKH, BPNT, listrik gratis dan yang lainnya, yang mereka inginkan itu ketika tetangganya dapat bantuan dia juga pengen, nah ketika terjadi masalah seperti itu, Desa yang di salahkan.”

Bila halnya demikian, aturan yang dijelaskan dalam Pedoman Umum PKH tentang sinergitas dan komplementaritas PKH dengan berbagai sektor seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Instansi atau Lembaga terkait lainnya dimana KPM PKH berhak menerima program dari kementerian lain dalam rangka percepatan program penanggulangan kemiskinan kurang tersosialisasikan dengan baik di lapangan.

Staff Seksi Pemberdayaan Kecamatan Cikalong Wetan yang juga sebagai informan mengungkapkan bahwa seharusnya yang mendapatkan bantuan itu orang-orang yang benar-benar layak sesuai kriteria BPS, dan benar-benar di validasi terutama kepemilikan aset, pendapatan perbulan, serta keadaan rumah tinggalnya, karena apabila tidak dilakukan dengan baik akan menimbulkan rasa cemburu dan masalah dilapangan. Selain itu, informan mengungkapkan bahwa banyak janda-janda dengan usia lanjut di berbagai Desa yang sama sekali tidak tersentuh bantuan apapun.

Pernyataan tersebut seolah mempertegas bahwa PKH di Desa Mandalamukti, Kabupaten Bandung Barat belum benar-benar nampak. Ini terjadi karena proses validasi data calon kepesertaan yang sebelumnya telah ditentukan oleh pemerintah bukan data terbaru mengenai kondisi masyarakat di suatu wilayah yang benar-benar layak menerima ini tentunya kurang adil karena masyarakat yang secara kriteria layak mendapat bantuan justru tidak mendapatkan bantuan, tetapi masyarakat yang kurang layak justru yang mendapat bantuan.

Kecemburuan dan ketidakadilan yang dirasakan oleh sebagian besar masyarakat yang dikategorikan pra sejahtera di Kecamatan Cikalong Wetan, termasuk ibu tunggal yang tidak mendapat bantuan apapun, muncul ketika tidak tersentuh oleh program-program penanggulangan kemiskinan, padahal mereka mempunyai kesempatan yang sama karena memenuhi standar kriteria yang di tetapkan oleh pemerintah. Bila dilihat dari nilai *equality* dalam kebijakan sosial tentunya ini bertentangan, karena ada perlakuan yang berbeda terhadap kelompok yang dianggap sama yakni di kategorikan sebagai masyarakat miskin.

Munculnya program seperti Cek Bansos terutama dalam mengatasi permasalahan-permasalahan bagi masyarakat yang tidak tersentuh oleh bantuan sosial padahal secara

kriteria layak, sejalan dengan nilai *adequacy* dalam kebijakan sosial dimana program tersebut mengarah pada nilai dan kepuasan masyarakat terhadap kelayakan suatu program bantuan sosial seperti PKH.

Selain itu, dalam wawancara dengan pendamping PKH, penulis mendapatkan informasi mengenai upaya lain dari petugas PKH untuk masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan, Pendamping PKH menjelaskan:

“Untuk masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan PKH kita biasanya akan mengarahkan ke pihak operator SISK-NG Desa dengan membawa persyaratan yang dibutuhkan, seperti kartu keluarga dan foto rumah tampak depan”.

Berbagai kendala yang terjadi di lapangan dalam penentuan sasaran PKH bisa diminimalisir ketika proses validasi benar-benar dimaksimalkan, sekalipun pemerintah menggunakan data yang tergolong usang dalam menentukan "siapa" yang berhak mendapat bantuan. Orang-orang yang dikatakan mampu atau pun kurang layak mendapatkan bantuan akan tereleminasi, serta bantuan yang akan disalurkan tepat pada sasaran. Seperti yang banyak ditemukan dilapangan masyarakat masih mengeluhkan banyaknya ketidak tepatan sasaran penerima PKH, dengan begitu Pendamping PKH menjelaskan :

“dalam menanggapi keluhan masyarakat yang mengeluhkan adanya salah sasaran pada KPM PKH, petugas mempunyai saluran pelaporan lalu datang ke *secretariat* PKH yang diteruskan dengan penghapusan di *system* bisa dengan catatan telah disetujui di rapat mudes”.

Adapula kendala yang dirasakan oleh penerima bantuan, yang pada awalnya mendapatkan bantuan yang di salurkan melalui rekening Bank, kini setiap tahap pencairan rekeningnya tetap kosong, seperti yang dikatakan oleh ibu Nunik Nurlela sebagai anggota PKH :

“kendalanya itu kurang informasi mengenai pencairan, karna pencairannya di Bank jadi saya tidak tahu, sudah beberapa tahap pencairan tapi ATM saya kosong, kalo memang saya sudah tidak menjadi anggota PKH seharusnya ada pemberitahuan agar saya tidak berharap bantuannya cair”.

Sejauh ini pelaksanaan PKH di Desa Mandalamukti Kecamatan Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat ditinjau lancar, tidak ada permasalahan serius yang dialami oleh

anggota PKH maupun petugas dari PKH, meskipun masih ada keluhan dari masyarakat tentang sasaran yang kurang tepat dan pendamping PKH pun memiliki sedikit kendala saat melaksanakan program ini. Seperti yang pendamping PKH katakana:

“pelaksanaan PKH terbilang lancar, karena ada *bussines process* di setiap bulannya, untuk kendala itu ada saja seperti mengakomodir masyarakat yang ingin mendapat bantuan akan tetapi tidak memiliki data kependudukan”

## 5. KESIMPULAN

### Kesimpulan

Di Kecamatan Cikalong Wetan PKH mulai terlaksana pada tahun 2012. Yang pada awalnya, terdapat 2138 KPM dengan berbagai alasan kini menjadi 617 KPM dengan cakupan keluarga atau Rumah Tangga Sangat Miskin, tersebar di 13 Desa. .

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di lapangan seputar sasaran penerima bantuan yang digulirkan oleh pemerintah, data yang digunakan untuk sasaran penerima adalah data dari DTKS, namun masih ada masyarakat yang merasakan kecemburuan dikarenakan dirinya merasa layak mendapatkan bantuan tersebut. Berbeda dengan informasi dari hasil wawancara dengan pendamping PKH, menurut pendamping PKH di Desa Mandalamukti sudah tepat sasaran karena merujuk pada hasil data dari DTKS.

### Saran

1. Direktorat Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial/Dinas Sosial”Program Keluarga Harapan”, harus melakukan evaluasi lebih mendalam mengenai proses penentuan sasaran penerima bantuan pada Desa Mandalamukti.
2. Petugas Dinas Sosial atau PKH berdiskusi dengan perangkat Desa Mandalamukti dalam hal sinkronisasi data baru calon penerima bantuan PKH pada operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS NG)

## 6. REFERENSI

- Badan Pusat Statistik “Kemiskinan tahun 2023,  
<https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/01/16/2015/persentase-penduduk-miskin-september-2022-naik-menjadi-9-57-persen.html>, diakses tanggal 6 Januari 2024
- Direktorat Jaminan Sosial Keluarga,”Pedoman Pelaksanaan PKH Tahun 2019,  
<https://pkh.kemensos.go.id>, diakses tanggal 10 Januari 2024.
- Direktur Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial,”Pedoman Pelaksanaan PKH Tahun 2021, <https://kemensos.go.id/uploads/topics/16202973084877.pdf> , diakses tanggal 10 Januari 2024
- Hasibuan, Malayu S. .. 2020. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jannah, R. (2019). *Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Rawaterate Jakarta Timur* (Bachelor's thesis, FISIP UIN Jakarta).
- Kartika Nih Ayu, dkk, “Pengukuran Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Sistem E-Risearch STIKOM Bali”, Konferensi Nasional Sistem dan Informatika 2015, Vol. 11, No 2 2017, Jurnal Sistem dan Informatika, <http://studybibid.com>.
- Kristina, Naning, and Wahna Widyaningrum. 2019. MANSKILL Managerial Skill. Ponorogo: UNMUH PONOROGO PRESS.
- Mulyono, S. E. (2017). Kemiskinan Pemberdayaan Masyarakat. In *Yogyakarta: Penerbit Ombak*. Penerbit Ombak.
- Murah. (2016). Program Keluarga Harapan (PKH) Sebagai Investasi Sosial. *Journal Ilmiah Rinjani: Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani*, 4(4), 120–128
- Pedoman Umum Program Keluarga Harapan 2018
- Pedoman Umum Program Keluarga Harapan 2023
- Ridho, R. (2019). *Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Nagari Tanjung Bungo Kecamatan Suliki Kabupaten Limapuluh Kota* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Saragi, S., Batoebara, M. U., & Arma, N. A. (2021). Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Kota Rantang Kecamatan Hamparan Perak. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 8(1), 1–10. <https://doi.org/10.37606/publik.v8i1.150>



- Sugiyono, 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suwendra, I Wayan. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif “dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan”*. Bali: NilaCakra.